

## PELUANG DAN TANTANGAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL UNTUK MEMBERDAYAKAN INDUSTRI MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI JAWA TENGAH

Arif Pujiyono

Universitas Diponegoro  
arifpujiyono@undip.ac.id

**Abstract:** This research aims to identify the opportunities and chalanges of baitul maal wat tamwil (BMT) to empower micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Central Jawa. This research use descriptive statistic nanalysis from primary and secondary data from BMT and key persons. Base on field study and literatur review, BMT have opportunities which looking for macroeconomy condition, the opened market of MSMEs, government policy, linkage with another financial institution, and public accountability. The chalanges of BMT is the minimum of the infra structure and supra structure, especially in human resources, on line system, limited of capital to open new branch, the copmpetitors from bank which have big capital, and standardize of financial operation. The strategy for BMT are make modern cooperative BMT, syariah compliance of the product, good govarnance management and professional and make good performance.

**Keywords:** mikro, small, and medium enterprises, baitul maa wat tamwil, opportunities and chalanges

**Abstrak:** Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Jawa Tengah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan statistik deskriptif yang bersumber dari data-data primer dan sekunder dari BMT dan tokoh kunci yang relevan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, BMT memiliki peluang terkait dengan pertumbuhan makro ekonomi, pasar UMKM yang masih terbuka, kebijakan pemerintah yang mendukung, kerjasama inter dan antar lembaga BMT, dan akuntabilitas publik terhadap BMT. Adapun tantangan yang dihadapi BMT ke depan terdiri dari supra dan infrastruktur yang terbatas, terkait dengan kompetensi sumberdaya manusia dan minimnya pelatihan yang diikuti, keterbatasan sarana modern yang bersifat on line, rendahnya modal untuk membuka cabang baru dan tingkat persaingan dengan lembaga keuangan bank-bank besar yang masuk di sektor keuangan mikro, dan standarisasi keuangan serta jaminan bagi nasabah. Strategi yang dapat dilakukan oleh BMT di antaranya adalah legalitas hukum menuju koperasi modern, tetap konsekuen dengan akad-akad syariah, manajemen yang handal dan profesional melalui berbagai pelatihan, serta membangun citra untuk bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.

**Kata kunci:** industri mikro, kecil dan menengah, baitul maal wat tamwil, peluang, tantangan

## **PENDAHULUAN**

Sistem ekonomi islam merupakan sistem ekonomi yang sempurna dan dibangun berdasarkan prinsip dan etika agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam perkembangan sistem keuangan modern, keberadaan lembaga keuangan islami merupakan konsekuensi logis islam dalam menyesuaikan dinamika pembangunan ekonomi. Lembaga keuangan syariah memiliki posisi penting dan strategis dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam perkembangannya, di Indonesia dikenal dua lembaga keuangan syariah, bank syariah dan bukan bank syariah, seperti pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga pembiayaan, dana pensiun dan lembaga keuangan mikro syariah (*baitul maal wat tamwil/BMT*).

Berdasarkan nilai historis BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang paling dinamis perkembangannya di Indonesia. Secara historis, sejarah berdirinya BMT diawali oleh sekelompok anak muda melalui Kelompok Swadaya Masyarakat mendirikan BMT Insan Kamil awal tahun 1992 (Sumiyanto, 2008). Secara sosiologis, BMT juga sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia di mana banyak anak-anak muda yang secara bersama-sama membentuk lembaga keuangan syariah dari, oleh dan untuk masyarakat kecil. Secara ideologis, BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang mengumpulkan dan mengembangkan dana umat berdasarkan prinsip syariah yang bebas dari unsur perjudian/spekulatif (*maisir*), ketidakjelasan (*gharar*), dan bunga (*riba*).

Dalam terminologi keuangan islam, istilah BMT merupakan gabungan dari *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* memiliki fungsi utama mengumpulkan dana publik umat seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah dan hibah kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak. Adapun *baitul tamwil* berfungsi mengumpulkan dana-dana *idle* dalam bentuk simpanan kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan untuk mendapatkan

margin keuntungan atau laba. Pada intinya BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan umat, khususnya masyarakat miskin, kelas kecil dan menengah.

Dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia, sektor riil usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki potensi dan kedudukan strategis ditinjau dari jumlah unit usaha yang berarti menyerap banyak tenaga kerja dan sumberdaya alam lokal, kontribusi terhadap ekspor nonmigas kedua dan urgensi struktur ekonomi berbentuk piramida yang menunjukkan ketimpangan yang lebar antara industri besar dengan industri kecil (Kuncoro, 2009)

Upaya pengembangan UMKM untuk memperkuat struktur perekonomian nasional ternyata menghadapi masalah mendasar Kuncoro (2009), Setyari (2005) dan Hafisah (2004): (1) kelemahan struktur modal dan akses untuk memperolehnya; (2) kelemahan memperoleh dan memperluas akses pasar; (3) kelemahan manajemen dan sumberdaya manusia; (4) keterbatasan jaringan dan sistem informasi; (5) iklim usaha yang tidak kondusif; (6) ketidakterpaduan pembinaan; (7) sifat produk yang jangka pendek dan (8) implikasi perdagangan bebas dengan masuknya pesaing dari luar.

Penelitian terkait dengan permasalahan UMKM yang dilakukan Fareshti, dkk (2008) menyimpulkan bahwa permodalan yang dimiliki UMKM mayoritas adalah kecil dan bersumber dari internal dan hanya sedikit yang bersumber dari bank. Bank selama ini belum mampu sebagai agen pemberdayaan UMKM di Indonesia, apalagi sampai ke pelosok pedesaan (Panggabean, 2007).

Permasalahan permodalan dalam UMKM sering menjadi fokus perhatian kebijakan pemerintah. Berbagai regulasi kredit UMKM telah mewarnai upaya pemberdayaan UMKM. Namun demikian berbagai kredit UMKM, khususnya dari sektor perbankan masih sulit diakses oleh UMKM. Penelitian Susilo (2007) menyimpulkan bahwa kesulitan UMKM memperoleh permodalan karena persyaratan

kredit yang sulit dipenuhi dan masih tingginya suku bunga kredit untuk UMKM. Regulasi sistem perbankan mengkondisikan UMKM harus siap dengan standar baku prosedur dan persyaratan kredit sampai kinerja keuangan (5C). Salah satu kendala syarat yang sulit dipenuhi oleh UMKM adalah adanya jaminan/agunan kredit (*collateral*). Meskipun memiliki kinerja keuangan dan kapasitas usaha yang baik, selama tidak ada agunan, maka UMKM tetap sulit memperoleh kredit. Tingginya suku bunga juga mengakibatkan UMKM sulit mengembalikan kredit.

Perkembangan BMT di berbagai wilayah merupakan jawaban dari kebutuhan UMKM untuk mendapatkan akses keuangan sekaligus pembinaannya. Meskipun belum ada data akurat terkait jumlah pasti BMT di Indonesia, setidaknya PINBUK (2004) pernah mendata bahwa jumlah BMT di Indonesia lebih dari 3.700. Melalui BMT yang banyak dan tersebar di berbagai pelosok wilayah tanah air ini, diharapkan UMKM mudah dalam mengakses modal dengan prosedur mudah, bisa tanpa agunan dan berbasis sistem bagi hasil melalui pola kemitraan.

Rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah BMT pada dasarnya memiliki potensi besar namun belum terdata dengan baik khususnya peluang dan tantangannya ke depan untuk memberdayakan UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan BMT di Jawa Tengah untuk memberdayakan UMKM.

## METODE PENELITIAN

### Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh BMT di Propinsi Jawa Tengah. Sehubungan tidak adanya jumlah akurat BMT di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data dari Asosiasi BMT Jawa Tengah di mana yang menjadi anggota sebanyak 347 BMT. Penelitian ini menggunakan quota sampling sebanyak 120 BMT yang secara proporsional dibagi sesuai dengan karakteristik geografis kabupaten dan

kota yang religius muslim-bukan muslim, sentra UMKM dan bukan, pusat pertumbuhan ekonomi-bukan pertumbuhan ekonomi.

### Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik diskriptif berdasarkan sumber-sumber yang relevan, baik data primer, data sekunder maupun literatur yang terkait dengan penelitian. Analisis statistik deskriptif didasarkan pada data primer yang diolah dari kuesioner yang diberikan kepada pengelola BMT untuk mendapatkan gambaran umum BMT di Jawa Tengah dan pengelolaannya.

Untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan BMT dalam memberdayakan UMKM di Jawa Tengah, penelitian ini juga melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak yang strategis dan memiliki informasi secara baik terhadap prospek BMT Jawa Tengah ke depan, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Ketua Asosiasi BMT, Kementerian Agama dan pengelola lembaga keuangan syariah lain di wilayah sampel. Data-data pendukung juga dikumpulkan dari sumber-sumber yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, jumlah umkm, dan sebagainya.

## TINJAUAN LITERATUR

### Pengertian dan Dasar Hukum BMT

BMT merupakan singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil, yang berarti rumah harta dan usaha. Baitul dekemngkan berdasarkan konsep sejarah baitul maal pada masa Rasulullah Muhammad SAW, yang berfungsi untuk menerima dana sosial sekaligus menyalurkan (*tasyarruf*). Secara sederhana BMT merupakan sebuah organisasi yang terbentuk dari Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang banyak dikenal dan tumbuh dengan pesat dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro yang telah lama berkembang semacam Badan Kredit Desa (BKD), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan

lembaga keuangan mikro lainnya. Hal ini seiring dengan kesadaran umat islam khususnya dan masyarakat tingkat bawah pada umumnya akan pentingnya suatu lembaga keuangan mikro yang menerapkan prinsip syariah, memiliki keraifan lokal dalam menyelesaikan masalah, khususnya rakyat bawah dan miskin.

Secara legal formal BMT dapat berbadan hukum yang berlandaskan pada azas koperasi syariah. Secara prinsip, fungsi dan operasionalisasi BMT tidak jauh berbeda dengan bank syariah. Perbedaan mendasarnya terletak dari regulasi pendukung dan aturan operasionalisasinya. Bank syariah menggunakan landasaskan hukum UU Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan Peraturan-Peraturan yang dikeluarkan oleh BI. Sementara itu BMT landasan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Koperasi dan peraturan-peraturan pemerintah lain yang terkait dengan koperasi, seperti UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Kemenkop No 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dalam perkembangannya BMT justru lebih fleksibel dan mudah untuk mengembangkan produk, karena tidak terikat peraturan perbankan yang berat dan lebih sesuai dengan sistem perekonomian dan akar budaya masyarakat Indonesia.

Jika ditinjau aspek hukum dan peranannya, perhatian dan pengembangan BMT menjadi suatu keharusan. Pembangunan ekonomi di Indonesia meskipun telah menunjukkan berbagai keberhasilan, ternyata masih meninggalkan beberapa persoalan lain. Di antara persoalan ekonomi yang selalu menjadi masalah sampai saat ini adalah ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dan ketidaksehatan dalam pertumbuhan iklim usaha antara usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan usaha besar. Selama ini iklim usaha

lebih menguntungkan bagi tumbuh kembangnya pengusaha, sementara itu, masyarakat miskin, sektor informal, pengusaha mikro dan kecil memiliki banyak keterbatasan dalam modal dan akses mendapatkannya, tidak memiliki aset tetap sebagai agunan dan lemahnya jalur struktural kepada pengambil keputusan. Kalaupun pengambil keputusan memperhatikan usaha mikro dan kecil, itu lebih disebabkan alasan politis ataupun dalam bantuan dana jumlahnya relatif kecil, sehingga dampaknya juga masih kecil. Hal ini mengakibatkan masyarakat miskin, pengusaha mikro dan kecil kurang kompetitif, tidak efisien dalam berproduksi, terbatas dalam melakukan inovasi dan diversifikasi serta sulit memperoleh dan membiayai proyek. Oleh sebab itu, tuntutan penciptaan iklim usaha yang sehat dan kompetitif menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil. Apalagi masyarakat miskin potensial, sektor informal, usaha mikro dan kecil merupakan sektor usaha terbanyak yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Aktifitas pendirian BMT dewasa ini sangat besar artinya dalam upaya memacu aktifitas ekonomi masyarakat kecil, sebab selama ini masih sangat minimnya lembaga keuangan yang mampu menyentuh mereka. BMT diciptakan untuk kepentingan pengusaha mikro dan kecil. Melalui mekanisme syariah, BMT memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil. BMT memberikan jasa-jasa kepada masyarakat kecil secara mudah, cepat dan murah melalui sistem syariah yang melibatkan tawar-menawar secara ikhlas, rasional dan manusiawi antara nasabah dengan manajemen BMT. BMT juga menawarkan resiko dan hasil usaha secara adil, karena menggunakan sistem bagi hasil. BMT memberikan pelayanan pembiayaan kepada nasabah bukan pada agunan fisik, tapi ditekankan kepada jaminan moral, kepercayaan dan kelayakan usaha. BMT juga

menerima dan menyalurkan dana sosial kemasyarakatan (ZISWAFAH) yang dalam penyalurannya melalui akad bisnis tanpa bagi hasil (*qordul hasan*). *Qordul hasan* hanya diberikan kepada masyarakat kecil tanpa ada kewajiban pengembalian modal maupun bagi hasil. Oleh sebab itu *qordul hasan* lebih diarahkan pada masyarakat miskin potensial, pengusaha mikro dan kecil yang bangkrut bukan karena *human error* misalnya bencana dan punya potensi untuk berkembang.

### Sumber Dana dan Produk Keuangan BMT

Secara prinsip BMT memiliki prinsip operasional tidak jauh berbeda dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Secara umum, BMT dalam operasionalnya memiliki sumber dana (perhimpunan dana), produk penyaluran dan jasa-jasa lainnya (Buchori, 2009). BMT memiliki sumber dana dari:

- a. Simpanan pokok, sebagai modal awal dengan jumlah sama antar anggota yang termasuk akad musyarakah, di mana masing-masing satu sama lain dalam hak dan kewajiban.
- b. Simpanan wajib, sebagai modal koperasi di mana besarnya diputuskan melalui musyawarah dengan jumlah tetap dan disetorkan secara kontinyu setiap bulan sampai dinyatakan keluar dari anggota.
- c. Simpanan sukarela, merupakan bentuk investasi anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana untuk disimpan di BMT, baik dalam bentuk simpanan akad wadi'ah maupun mudharabah.
- d. Investasi pihak lain, yaitu suntikan dana dari pihak luar (misalnya Bank Syariah) untuk pengembangan usaha BMT, baik dengan prinsip akad musyarakah maupun mudharabah.

Adapun sesuai dengan sifat koperasi dan fungsinya yang dari, oleh dan untuk anggota, maka sumber dana yang diperoleh BMT harus disalurkan pada anggota maupun

calon anggota. Oleh sebab itu penyaluran dana BMT dapat menggunakan prinsip:

- a. Investasi/Kerjasama, untuk mendanai suatu usaha yang layak dan profitable dengan akad *musyarakah* atau *mudharabah*, seperti waserda, klinik, kantik dan usaha bisnis lainnya.
- b. Jual Beli, yaitu pembiayaan berdasarkan akad jual beli (*al bai'*) dengan tambahan margin laba. Akad jual beli ini dapat berupa melalui kesepakatan harga penjualan (*al murabahah*), jual beli paralel dengan pembayaran di akhir periode (*al istishna*) atau jual beli dengan pembayaran di depan (*as salam*).
- c. Jasa-jasa, yaitu kegiatan layanan lainnya seperti sewa (*al ijarah*), titipan (*al wadi'ah*), anjak piutan (*hawalah*), gadai (*ar rahn*), perwakilan (*al wakalah*), penjaminan (*al kafalah*) dan bantuan pinjaman lunak tanpa tambahan (*al qard*).

Dalam aspek pemasaran BMT dalam mencari sumber dana maupun menyalurkannya dapat memiliki kekhasan tersendiri. Hal ini bertujuan agar investor tertarik untuk bekerja sama dalam mengembangkan koperasi. Fitur produk tersebut hendaknya memiliki karakteristik nama yang spesifik, prinsip akad yang digunakan, sumber dana, target utama, jangka waktu yang istimewa, keuntungan yang menarik, persyaratan menarik/ringan, dan mitigasi risiko (Buchori, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum dan Potensi BMT di Jawa Tengah

Berdasarkan 120 sampel BMT yang diteliti secara umum BMT di Jawa Tengah secara yuridis formal hanya 3 BMT yang belum memiliki status badan hukum formal. Hal ini disebabkan ketiga BMT masih relatif baru beroperasi (kurang dari 2 tahun) dan masih

dalam proses perijinan. BMT sampel menginduk ke PINBUK sebanyak 53 BMT, 43 BMT ke PUSKOPSYAH, 4 ke MICROFIN dan 18 BMT menginduk lain-lain. Dari 120 BMT, 93 BMT sudah masuk menjadi anggota Asosiasi BMT Jawa Tengah.

Secara spesifik BMT sampel memiliki karakteristik sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1, yang terdiri dari potensi aset, simpanan dan pembiayaan minimum, tingkat pendidikan pengelola, jumlah nasabah, dan kinerja keuangan.

Berdasarkan jumlah aset, BMT sampel di Jawa Tengah memiliki aset bervariasi dengan jumlah aset minimum Rp 25.213.122, aset maksimum Rp 170.000.000.000 atau rata-rata aset sebesar Rp 5.194.706.952. Besarnya total aset ini mengindikasikan bahwa BMT di Jawa Tengah berpotensi besar sebagai sumber permodalan produktif bagi pembiayaan UMKM.

Potensi BMT ini juga didukung dengan kemudahan proses pengajuan pembiayaan usaha yang relatif mudah dengan pengajuan pinjaman minimal Rp 50.000 dengan rata-rata pinjaman terendah sebesar Rp 446.846. Rendahnya tingkat pembiayaan ini menunjukkan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan yang pro UMKM, khususnya usaha mikro atau rumah tangga. Pada sisi permintaan tabungan/simpanan, BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mendukung program pemerintah untuk giat menabung, karena rata-rata tabungan terendah adalah sebesar Rp 1.000 dengan nilai setoran tabungan minimal rata-rata Rp 13.000.

Sebagai lembaga keuangan mikro pro rakyat, potensi BMT juga dapat dilihat dari banyaknya nasabah yang menjadi anggotanya. Berdasarkan jumlah nasabah simpanan, BMT sampel di Jawa Tengah memiliki rata-rata nasabah simpanan sebanyak 2.556 dengan jumlah nasabah maksimum mencapai 60.000. Demikian pula nasabah pembiayaan rata-rata 1.568 dengan jumlah nasabah pembiayaan maksimal 55.000. Banyaknya jumlah nasabah ini mengindikasikan bahwa BMT telah diterima dengan baik oleh masyarakat. Potensi ini semakin terbuka lebar, mengingat jumlah penduduk di Jawa Tengah yang ideologis

muslim mencapai jiwa

Pengembangan BMT juga sangat dipengaruhi oleh manajemen pengelola, di mana kualifikasi pendidikan merupakan prasyarat keberhasilan BMT. Secara kualitas pendidikan pengelola BMT minimal adalah SLTP, itu pun lebih pada administrasi/kas. Adapun rata-rata pendidikan pengelola adalah S1 (68%). Meskipun demikian hanya 7 % yang memiliki kompetensi keuangan sekaligus syariah (lulusan sarjana keuangan syariah). Oleh sebab itu, pelatihan kompetensi terkait dengan akad-akad keuangan syariah beserta aplikasinya merupakan kebutuhan mendesak untuk pengembangan manajemen BMT.

Potensi BMT keuangan juga dapat dilihat dari kinerja keuangan. Berdasarkan tingkat bagi hasil simpanan dan pembiayaan, BMT sampel di Jawa Tengah memiliki kinerja yang cukup baik, dengan tingkat bagi hasil rata-rata simpanan sebesar 1,39% dan tingkat bagi hasil pembiayaan sebesar 2,47%. Tingkat pengembalian terhadap aset produktif (ROA) BMT juga menunjukkan kinerja yang baik sebesar rata-rata 6,48%. Pembiayaan bermasalah rata-rata pada BMT sampel juga relatif rendah sebesar 4,8%.

### **Peluang dan Tantangan BMT untuk memberdayakan UMKM di Jawa Tengah**

Seiring dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, pendirian BMT dan proses mendapatkan status badan hukum tidak sulit (PINBUK, tt dan Sumiyanto, 2008). Adapun badan hukum yang paling sesuai adalah koperasi syariah atau koperasi jasa keuangan syariah atau unit jasa keuangan syariah. Oleh sebab itu, karakteristik koperasi modern ini dapat ditempuh melalui (Sumiyanto, 2008):

- a. Legalitas hukum nasional koperasi dan persyaratan legal lainnya;
- b. Konsekuensi merealisasikan akad-akad syariah dan peraturan hukum lainnya;
- c. Manajemen pengelolaan yang profesional untuk akuntabilitas publik;
- d. Memiliki standarisasi keuangan, pelayanan publik ideal.
- e. Mampu meningkatkan kesejahteraan

bagi seluruh anggota dan masyarakat sekitarnya.

Jika ditinjau dari segi peluangnya, BMT di Jawa Tengah memiliki kesempatan besar untuk berkembang pada masa yang akan datang dengan beberapa alasan:

- a. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang relatif baik dan stabil.

Secara umum pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah masih relatif baik, meskipun di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi di propinsi lain di pulau Jawa. Terjadinya krisis keuangan global ternyata tidak banyak berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi. Meski pertumbuhan ekonomi banyak ditopang oleh sektor konsumsi, namun justru hal ini menunjukkan peluang sektor riil masih dominan berkembang.

- b. Peluang pasar yang potensial  
Mayoritas (82,5%) penduduk muslim yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Tengah (BPS, 2010) merupakan potensi pasar yang tidak mampu dijangkau bank syariah. Apalagi dengan kemudahan menjadi anggota BMT dengan tingkat tabungan yang rendah (minimal Rp 1.000), diharapkan masyarakat kecil semakin tertarik pada BMT. Pada sisi penyaluran pembiayaan, UMKM juga menjadi pasar potensial bagi BMT, di mana mayoritas merupakan industri pengolahan yang kreatif, sebagai ikon daerah dan didukung oleh sumber daya lokal (Widiyanto dan Sumarno, 2010). Adanya standarisasi persyaratan baku dari lembaga keuangan bank, termasuk agunan, menjadikan UMKM lebih memilih BMT dengan prosedur yang lebih mudah, bisa tanpa agunan dan nilai pembiayaan minimal Rp 50.000, menjadikan BMT sebagai pilihan utama bagi pengembangan UMKM sekaligus untuk pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.

- c. Dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan dan peraturan.  
Kebijakan pemerintah merupakan

aspek mendasar dalam operasionalisasi BMT. Meskipun belum memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur koperasi syariah (BMT), setidaknya Undang-Undang No 25 Tahun 1992 sudah memiliki kekuatan hukum. Secara operasional terkait dengan produk keuangan BMT dapat mengacu Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berbagai produk turunan dan penjelasannya melalui Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional. Secara teknis pelaksanaan kegiatan koperasi syariah (BMT) dideluarkan Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

- d. Adanya kerjasama inter dan antar lembaga BMT

Dalam upaya mengembangkan BMT, sinergitas dan kerjasama dengan lembaga lain menjadi sangat penting. Kerja sama inter lembaga BMT selama ini sudah dilakukan melalui pengorganisasian dan manajemen (Puskopsyah dan Asosiasi BMT Jawa Tengah), permodalan (BMT Center), atau kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya melalui *executing*, *join financing* dan *channeling*.

- e. Akuntabilitas dan pelayanan publik yang profesional.

BMT memiliki akuntabilitas publik terkait dengan produk keuangan yang bervariasi, produknya juga mengandung unsur pembinaan melalui hubungan kemitraan bukan kreditur-debitur, menjadi ujung tombak sosialisasi sistem keuangan syariah sampai di berbagai pelosok, dan sebagai institusi pengentasan kemiskinan melalui fungsi *baitul maal*.

Adapun jika ditinjau berdasarkan eksistensinya ke depan, BMT di Jawa Tengah akan menghadapi tantangan dan kendala, di antaranya:

- a. Tantangan suprastruktur

Sudah banyak dipahami bahwa permasalahan utama pengembangan lembaga keuangan syariah adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan ahli baik dari sisi syariah sekaligus operasional keuangan dan ekonomi. Meskipun tingkat pendidikan terbanyak (..persen) sarjana, namun selama ini buka berasal dari tamatan ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, secara khusus pemerintah propinsi Jawa Tengah memiliki Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM, termasuk untuk BMT namun kendala dana internal menjadikan BMT tidak dapat mengirimkan wakilnya untuk berperanserta aktif. Selain itu banyak BMT (...persen) tidak memiliki dana khusus untuk penelitian dan pengembangan BMT (Pujiyono, dkk, 2012).

b. Tantangan infrastruktur

Dalam upaya mendukung pengembangan BMT menjadi koperasi, infrastruktur sarana dan prasarana penunjang jasa keuangan kepada masyarakat menjadi sangat penting. Berdasarkan studi lapangan, tidak ada satu pun BMT yang memiliki fasilitas on line apalagi sampai pada e-BMT-ing. Hal ini sangat rasional mengingat biaya operasional on line apalagi layanan elektronik sangat besar. Meskipun demikian pelayanan bagi masyarakat melalui elektronik, termasuk ATM, menjadi sangat penting untuk mendukung mobilitas nasabah. Karena berada di lingkungan Kementerian Koperasi dan UMKM, maka BMT tidak mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan dan bukan menjadi lingkup tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan, sehingga kurang/tidak/belum pro nasabah.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil studi pustaka dan lapangan yang telah dilakukan beberapa simpulan penting yang dapat diambil adalah:

- a. BMT di Jawa Tengah memiliki peluang untuk mendorong pertumbuhan UMKM ditinjau dari stabilitas pertumbuhan ekonomi, pasar potensial UMKM yang banyak, dukungan peraturan dan kebijakan pemerintah, kerja sama antar dan antar BMT dan akuntabilitas publik.
- b. Dalam menunjang eksistensinya, BMT menghadapi tantangan dari suprastruktur berupa SDM yang sesuai kualifikasi standar dan kurangnya pelatihan, serta tantangan infrastruktur berupa keterbatasan sarana penunjang, keterbatasan modal untuk membuka cabang dan belum banyaknya dukungan lembaga lain apalagi semakin banyak lembaga pesaing yang membuka pasar keuangan mikro syariah.

Beberapa rekomendasi yang dapat diambil untuk mendukung pengembangan BMT untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM adalah:

- a. Adanya Undang-Undang Koperasi Syariah sebagai payung hukum tertinggi dan lembaga penjamin simpanan nasabah sebagaimana lembaga bank syariah.
- b. Kerja sama dengan perguruan tinggi, dinas dan lembaga terkait lain untuk menghasilkan dan melatih sumber daya insani yang profesional sesuai dengan kebutuhan internal dan kernal BMT.
- c. Memperkuat linkage dengan lembaga keuangan lain dalam mendukung permodalan BMT khususnya bank syariah agar BMT dapat melakukan ekspansi usaha atau pembukaan cabang baru melalui mekanisme *executing* dan *channeling*.

Pada akhirnya, BMT merupakan potensi lembaga keuangan mikro syariah yang strategis untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan UMKM. Pengembangan BMT ke



depan menjadi tanggung jawab semua pihak, apalagi semakin terbukanya persaingan bebas dengan berdirinya berbagai lembaga keuangan asing yang masuk dalam bisnis ini dengan dukungan modal dan semakin masifnya produk pesaing UMKM dari luar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Buchori, Nur S, 2009, *Koperasi Syariah*, Sidoarjo: Masyhury.
- Fareshti, N.D, Saputo, E.P, dan Purnomo, Didit, 2008, Penguatan Klaster Usaha Kecil dan Menengah: Kasus di Serenan, Klaten, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 9, No. 1, Juni 2008, hal. 83-95.
- Hafsah, M.J, 2004, Upaya Pengembangan UKM, *Infokop*, Nomor 25 Tahun 2004.
- Kuncoro, Mudrajad, 2009, *Ekonomika di Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*, Yogyakarta: UPP STIPM YKPN.
- Panggabean, Riana, 2007, Kerjasama Bank, Koperasi, dan Lembaga Keuangan Mikro untuk Mendukung Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), *INFOKOP*, Vol. 15, No. 2, Desember 2007, hal. 44-58.
- PINBUK, tt, *Pedoman Tata Cara Pendirian BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*, Jakarta.
- Setyari, N.P.W, 2005, Dinamika Pengembangan UMKM di Indonesia, *Working Paper*, Universitas Udayana.
- Susilo, Y.S, 2010, Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi DIY, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 14, No.3, September 2010, hal. 467-478.
- Sumiyanto, Ahmad, 2008, *BMT Menuju Koperasi Modern*, DI Yogyakarta: ISES Publising.
- Widiyanto dan Sumarno, 2010, Strategi Pengembangan UMKM di Jawa Tengah. *Eksplanasi*, Vol. 5, No. 1, Maret 2010, hal. 54-68.

**Tabel 1. Gambaran Umum Potensi BMT di Jawa Tengah untuk Mendukung Pengembangan UMKM**

Keterangan	Minimum	Maksimum	Rata-rata
Total Aset (Rp)	25.213.122	170.000.000.000	5.194.706.952
Pembiayaan minimum (Rp)	50.000	2.000.000	446.846
Simpanan minimum (Rp)	1.000	25.000	13.000
Pendidikan pengelola	SLTP	S2	S1 (68%)
Jumlah nasabah simpanan	100	60.000	2.556
Jumlah nasabah pembiayaan (org)	20	55.000	1.568
Tingkat bagi hasil tabungan (%)	0,02	2,5	1,39
Tingkat bagi hasil pembiayaan (%)	0,15	2,2	2,47
ROA (%)	0,01	15,0	6,48
Kredit Bermasalah	0,00	23,0	4,8

Sumber: Data primer, 2012, diolah.